

LAPORAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN *Good Corporate Governance (GCG) Implementation Report* Tahun 2011

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) di PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. selanjutnya disebut Bank BNP dapat diartikan sebagai suatu pola, hubungan, sistem dan proses yang diimplementasikan di perusahaan yang bertujuan untuk peningkatan nilai perusahaan (*corporate value*) yang berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi perusahaan dengan memperhatikan hak-hak seluruh pemangku kepentingan. Visi dan misi Bank BNP saat ini adalah menjadi bank ritel nasional yang sehat, handal, dan terpercaya.

Penerapan prinsip-prinsip utama GCG seperti keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), bertanggungjawab (*responsibility*), independen (*independency*) dan adil (*fairness*) di Bank BNP dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam pelaksanaan berbagai aspek kegiatan perbankan seperti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, dewan direksi dan komite, rencana strategis, penanganan benturan kepentingan, berfungsi dengan baiknya unit-unit kerja pengendalian (Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern) ataupun fungsi audit ekstern yang senantiasa dilakukan evaluasi, review dan perbaikan diri (*self improvement*) dari waktu ke waktu akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pencapaian pelaksanaan GCG di Bank BNP

Upaya berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan GCG memberikan dampak positif bagi dukungan dan kinerja Bank secara keseluruhan yang semakin baik, dan peningkatan kualitas tingkat kesehatan bank yang membaik pula. Evaluasi dan review yang dilakukan secara mandiri (*self assesment*) dapat menjadi dasar yang kuat bagi penilaian dan langkah perbaikan yang dilakukan agar arah pelaksanaan GCG Bank BNP tidak terlepas dari tujuan awalnya yaitu pencapaian visi dan misi Bank BNP untuk menjadi salahsatu bank ritel pilihan yang berskala nasional yang sehat, handal dan terpercaya dalam menjalankan aktivitas perbankan dan jasa keuangan.

Berikut Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit berdasarkan hasil Self Assessment terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, dalam tabel tersebut di bawah ini :

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. selama tahun 2011 mengalami perubahan, dari semula :

Presiden Komisaris : Junichi Yoroisaka
Komisaris : Tatang Hermawan
Komisaris Independen : Karel Tanok
Komisaris Independen : Abdul Malik Sugiarto
Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Menjadi

Presiden Komisaris : Yasuo Uonomi
Komisaris : Tatang Hermawan
Komisaris Independen : Karel Tanok
Komisaris Independen : Abdul Malik Sugiarto
Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Komposisi Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan palingbanyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili diIndonesia
3. Jumlah Komisaris Independen paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota DewanKomisaris
4. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia
5. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan baik sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga/Perusahaan bukan Lembaga Keuangan Lain/Bukan Bank atau sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam bertindak independen. PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. memiliki 3 (tiga) orang anggota Komisaris Independen. Masing-masing Komisaris Independen ini mengetuai Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan perubahannya No 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang kewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi masukan kepada Direksi untuk kepentingan perseroan.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan melakukan rapat Dewan Komisaris, maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi.

Pengawasan Dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2011, Dewan Komisaris telah melakukan 11 (sebelas) kali pertemuan, yaitu 4 (empat) kali rapat internal Dewan Komisaris dan 7 (tujuh) kali rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Pengawasan atas kebijakan kepengurusan Direksi yang telah dilakukan selama tahun 2011, antara lain:

Tanggal	Perihal
11 Maret 2011	Merekomendasikan usulan calon Presiden Komisaris .
18 Maret 2011	Merekomendasikan usulan kenaikan gaji karyawan tahun 2011.
20 Mei 2011	Merekomendasikan usulan perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian tantiem/bonus atas laba perseroan tahun buku 2010.

Tanggal	Perihal
20 Mei 2011	Merekomendasikan nominasi calon Direksi dan Komisaris.
27 Mei 2011	Merekomendasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan tahun buku 2011.
27 Mei 2011	Merekomendasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka evaluasi penilaian kinerja fungsi SKAI Bank dan fungsi Audit Intern atas penggunaan TI
29 Juli 2011	Merekomendasikan usulan perubahan tunjangan dinas dan kesejahteraan karyawan.
2 Desember 2011	Memberikan memo internal kepada Direksi sehubungan dengan Kasus Penyalahgunaan Wewenang yang terjadi di KCP Pagongan, Cirebon.

Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membawahi 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang masing-masing diketuai oleh Komisaris Independen. Masing-masing anggota komite tersebut berasal dari pihak independen. Melalui komite-komite tersebut, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

C. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2011 Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, yaitu 4 (empat) kali rapat internal Dewan Komisaris dan 7 (tujuh) kali rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Mekanisme pengambilan keputusan rapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat serta dituangkan dalam Risalah Rapat yang didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya didokumentasikan dengan baik. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam rapat Dewan Komisaris dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

Topik yang dibahas dalam rapat serta kehadiran Dewan Komisaris, sebagai berikut :

Tanggal	Agenda	Jumlah Kehadiran
Januari 2011	Membahas dan membuat rencana kerja serta agenda dan jadwal rapat Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris untuk tahun 2011.	3/5
Januari 2011	Membahas dan membuat rencana kerja serta agenda dan jadwal rapat Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris untuk tahun 2011.	4/5
Februari 2011	Membahas hasil kinerja tahun 2010 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2011.	3/5
Maret 2011	Pembahasan agenda untuk Rapat Umum Pemegang Saham (diskusi nominasi calon Presiden Komisaris).	4/5
April 2011	Presentasi Realisasi Rencana Triwulan I tahun 2011.	3/5
Mei 2011	Pembahasan rekomendasi Akuntan Publik dalam rangka evaluasi penilaian kinerja fungsi SKAI Bank dan fungsi audit intern atas penggunaan TI.	3/5
Juni 2011	Presentasi KTA General Extra.	3/5
Agustus 2011	Presentasi Realisasi Rencana Hasil Triwulan II tahun 2011.	4/5
Oktober 2011	Presentasi Realisasi Rencana Hasil Triwulan III tahun 2011.	4/5
Desember 2011	1. Memperoleh informasi mengenai rencana penerbitan Bond/ Subordinated Bond. 2. Perkembangan persiapan penyusunan <i>Business Plan</i> . 3. Lain-lain.	4/5
Desember 2011	Rating Perusahaan dari PEFINDO.	2/5

D. ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain yang telah ditetapkan RUPS. Kepada anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pemegang saham sesuai kesepakatan para pemegang saham, tidak diberikan fasilitas berupa Remunerasi dan Fasilitas Lainnya dari Bank. Pemberian bonus/tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Bank BNP memiliki 5 (lima) orang Direksi, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2011. Seluruh Anggota Direksi telah lulus Fit & Proper Test serta telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

Susunan Direksi PTBank Nusantara ParahyanganTbk. adalah sebagai berikut :

1. Presiden Direktur : Ritsuo Ando
2. Direktur Bisnis : Budi Tjahja Halim
3. Direktur Perencanaan dan Keuangan : Koji Sawada
4. Direktur Operasional dan IT : Markus Sugiono
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Afandi

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum dan kewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka anggota Direksi memiliki tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan bisnis Bank BNP dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dan memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank serta amanat yang dituangkan dalam RUPS, bertanggungjawab dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari.

Direksi telah membentuk dan mengangkat Anggota Komite berdasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris, dan juga telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Kepatuhan.

Setiap hasil temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Audit Eksternal, maupun hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ditindaklanjuti dan dimonitor oleh Direksi.

Direksi melaksanakan tugasnya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal serta Peraturan Bank Indonesia, dan memperhatikan pembagian tugas & tanggung jawab

(job description) Direksi. Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dikomunikasikan melalui media yang mudah diakses seperti : elektronik (intranet), maupun dalam bentuk surat menyurat dan/atau Internal Memorandum.

C. RAPAT DIREKSI

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlepas dari fungsi manajemen terhadap semua aspek organisasi yaitu dengan menyelenggarakan rapat-rapat Direksi secara berkala yaitu satu kali dalam satu bulan dimana merupakan rapat formal rutin dilengkapi dengan notulen atau berita rapat, rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris, maupun rapat secara insidental sesuai kebutuhan dengan mengundang Pejabat Eksekutif maupun Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2011 telah diselenggarakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi rutin yang dihadiri oleh Anggota Direksi, dengan mekanisme pengambilan keputusan rapat berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam rapat Direksi maka hal tersebut akan dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil pembicaraan dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik. Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh Anggota Direksi dan setiap Keputusan Rapat Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

Rapat rutin (bulanan) Direksi selamatahun 2011:

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Direksi
12 Januari 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja akhir tahun 2010 - Persiapan Rakor RBB & KPI - Laporan Manajemen Risiko - Iuran Pension Fund untuk tahun 2011 - Lain-lain 	5

TanggalRapat	Agenda Rapat	Kehadiran Direksi
10 Februari 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja Januari 2011 - Progres mengenai <i>Subordinated Loan</i> - Laporan Manajemen Risiko - Laporan Profil Risiko Triwulanan posisi 31 Des 2010 - Lain-lain 	4
11 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> - ALCO - Laporan Manajemen Risiko bulan Januari 2011 - Laporan kinerja Februari 2011 - Lain-lain 	5
12 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja bulan Maret 2011 - Subordinated Loan - Laporan Manajemen Risiko Data Februari 2011 - ALCO - Lain-lain 	5
12 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja bulan April 2011 - Pelaporan kepada Komisaris mengenai Performance Triwulan I - Rencana RUPS - Pinjaman Subordinasi - Penunjukan Kantor Akuntan Publik - Laporan Manajemen Risiko Data Maret dan April 2011 - ALCO - Lain-lain 	5
7 Juni 2011	<ul style="list-style-type: none"> - KPI untuk Direksi - Cara settlement biaya dan cadangan - Lain-lain 	5
13 Juli 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja bulan Juni 2011 - ALCO - Pinjaman Subordinasi - Laporan Manajemen Risiko data Juni 2011 - Lain-lain 	5

TanggalRapat	Agenda Rapat	Kehadiran Direksi
15 Agustus 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja bulan Juli 2011 - Pilihan Rating Company - Kondisi untuk pinjaman <i>money market line</i> dari BTMU sebesar USD.25 mio - Laporan Manajemen Risiko data Juli 2011 - ALCO - Lain-lain 	5
12 Januari 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja akhir tahun 2010 - Persiapan Rakor RBB & KPI - Laporan Manajemen Risiko - Iuran Pension Fund untuk tahun 2011 - Lain-lain 	5
12 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja bulan Agustus 2011 - Pembahasan Masalah PAB - Laporan Manajemen Risiko data Agustus 2011 - ALCO - Lain-lain 	4
18 Oktober 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja bulan September 2011 - Laporan Manajemen Risiko data September 2011 - ALCO - Lain lain 	5
16 November 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja bulan Oktober 2011 - RBB - Kandidat <i>Underwriter</i> dalam rangka rencana penerbitan obligasi - Laporan Manajemen Risiko data Oktober 2011 - ALCO - Perubahan Persetujuan SOP (Oleh KaDiv Kepatuhan) - Kewenangan Asian Compliance Office (ACO) Singapura terhadap Bank BNP - Kewenangan Risk Management (e.g. Pre-PAB/ PAB) 	5

	- Lain lain	
TanggalRapat	Agenda Rapat	Kehadiran Direksi
9 Desember 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja bulan November 2011 - Laporan Manajemen Risiko data November 2011 - ALCO - Lain lain 	5

D.ASPEK TRANSPARANSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan diputuskan pailit berdasarkan ketetapan Pengadilan.

Seluruh anggota Direksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu atau tindak pidana kejahatan, serta tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota Direksi, atau Anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali Bank BNP.

Seluruh Anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank BNP untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank BNP, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank BNP selain yang telah ditetapkan oleh RUPS.

Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Seluruh anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank BNP.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

KOMITE – KOMITE DI BAWAH TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Komite-komite yang berada di bawah tanggung jawab Direksi dalam mendukung peransertatugas keseharian Direksi adalah sebagai berikut :

1. Komite Pemutus Kredit

Tugasnya meliputi pemberian keputusan dalam pemberian kredit, penghapusan, penentuan kualitas kredit dan lain sebagainya yang diselenggarakan di Kantor Pusat, dimana anggotanya terdiri dari anggota Direksi dan beberapa Pejabat Eksekutif terkait, dengan ketuanya adalah Presiden Direktur.

2. Komite *Asset Liabilities Committee* (ALCO)

Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 072-DIR/RISK/10/2010, yang bertugas untuk mengelola kebijakan dan strategi dalam mengkoordinasikan sumber dan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai maksimalisasi profit dari spread bunga/ NIM, dan komite ini diketuai oleh Presiden Direktur. Rapat ALCO dilaksanakan pada setiap bulan baik secara khusus dalam Rapat ALCO maupun bersamaan dengan jadwal Rapat Direksi rutin secara bulanan.

3. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 090-DIR/RM/11/2011 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan sebelumnya yang dikeluarkan tahun 2009. Bertugas untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan-kemungkinan risiko yang mungkin timbul sebagai akibat analisa *self assesment* yang dilakukan sekaligus memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur dimana Komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Rapat Komite Manajemen Risiko selamatahun 2011 :

Tanggal	Agenda Rapat
25 Februari 2011	<i>Review Insiden Emergency System Down BNP & DRC (Disaster Recovery Center)</i>

4. Komite Produk dan Jasa Baru

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: NOKEP: 009-DIR/COMP/03/2010, yang bertugas melakukan persiapan dan pengkajian terhadap seluruh aktivitas dan rencana peluncuran Produk dan Aktivitas yang baru (PAB), dimana anggota tetapnya terdiri dari Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Kepala Divisi IT, serta Kepala Divisi Terkait dan diketuai oleh Direktur Perencanaan & Keuangan.

Rapat Komite Produk dan Jasa Baru selamatahun 2011 :

Tanggal	Agenda Rapat
21 Feb 2011	Tabungan Jangka Panjang (JAPAN)
8 Maret 2011	Tabungan Japan
15 April 2011	Meeting Tabungan Japan dengan JASINDO
18 Mei 2011	Pembahasan Bancassurance & PAB Tabungan JAPAN
14 Juli 2011	Meeting Tabungan JAPAN Murni

27 Juli 2011	Finalisasi Tabungan JAPAN Murni
8 Agustus 2011	Meeting PAB Tabungan JAPAN Murni
18 Agustus 2011	Meeting Tabungan Japan Dollar Murni
6 September 2011	Pembahasan Definisi Produk atau Aktivitas Baru
9 September 2011	Pembahasan Definisi Produk atau Aktivitas Baru (pertemuan ke 2)
19 September 2011	Meeting Tabungan Japan Dollar Murni II

Tanggal	Agenda Rapat
22 September 2011	Pembahasan Rencana Divisi KTA dalam melakukan kerjasama dengan Branch Child
19 Oktober 2011	Pra PAB Mobil Kas Keliling, Western Union dan Internet Banking

5. Komite Kepatuhan,

Sesuai Surat Keputusan Nomor: NOKEP: 036-DIR/10/2009, yang bertugas melakukan analisis penerapan kepatuhan diseluruh bidang aktivitas Bank dan membahas peraturan-peraturan baru dari instansi berwenang termasuk Bank Indonesia dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur, dimana Komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Selamat tahun 2011 Komite Kepatuhan telah mengadakan rapat, sbb di bawah ini:

Tanggal	Agenda Rapat
19 Mei 2011	Koordinasi Mekanisme Pemantauan Ketentuan BI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) khususnya bagi Pihak Terkait
30 Mei 2011	Pembahasan Mekanisme Pemantauan Ketentuan BI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) khususnya untuk debitur group Pihak Tidak Terkait

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*),

Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, saat ini Surat Keputusannya yang terakhir adalah NOKEP: 032-DIR/IT/03/2011 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan sebelumnya. Komite yang tugasnya memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana strategis IT, pengembangan dan evaluasi sistem IT yang digunakan dan yang akan digunakan kemudian dan lain-lain. Komite diketuai oleh direktur yang membawahi IT yaitu Direktur Operasional & IT, dengan anggota tetap seluruh anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang membidangi IT.

Selama tahun 2011 Komite Pengarah IT telah mengadakan rapat rutin bulanan sebanyak 11 (sebelas) kali.

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

A. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Komposisi dan keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris meliputi :

1. Komite Audit

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota komite dari pihak independen. Susunan keanggotaan Komite Audit per Desember 2011 adalah:

Ketua Komite	: Abdul Malik Sugiarto *)
Anggota Komite	: Pilipus Azarjah
Anggota Komite	: Arifin S Haris

2. Komite Pemantau Risiko

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota Komite dari pihak independen. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per Desember 2011 adalah:

Ketua Komite	: Karel Tanok
Anggota Komite	: Arifin S Haris
Anggota komite	: Pilipus Azarjah

3. Komite Remunerasi Dan Nominasi

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggota seluruh anggota Dewan Komisaris dan seorang Kepala Divisi Sumber Daya Manusia.

Ketua Komite : Bachtiar Alam
Anggota Komite : Junichi Yoroisaka (kemudian digantikan oleh Yasuo Uonomi)
Anggota Komite : Tatang Hermawan
Anggota Komite : Karel Tanok
Anggota Komite : Abdul Malik Sugiarto *)
Anggota Komite : Agung Subagiyo Ka.Div SDM

*) terhitung tanggal 15 Maret 2012, beliau tidak menjabat lagi sehubungan meninggal dunia
Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi pada Bank yang sama maupun Bank lain, tidak merangkap jabatan pada Bank yang sama, Bank dan/atau Perusahaan lain, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) Komite dengan tugas sebagai berikut :

1. Komite Audit

Tugas Komite Audit yang utama adalah memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi :

- Melakukan kajian atas rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), memonitor pelaksanaannya dan melakukan evaluasi atas hasil kerjanya
- Melakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- Memantau kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku

- Memastikan terlaksananya tindak lanjut hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia oleh Direksi secara tepat waktu guna mendapatkan informasi yang digunakan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Selama tahun 2011, hal-hal yang telah dilakukan oleh Komite Audit :

1. Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan perusahaan untuk tahun buku 2011, yaitu Kantor Akuntan Hendrawinata Gani dan Hidayat (Grant Thornton International).
2. Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik dalam rangka evaluasi penilaian kinerja fungsi SKAI Bank dan fungsi audit intern atas penggunaan TI, yaitu KAP Drs. J Tanzil & Rekan.
3. Memberikan memo internal kepada Direksi sehubungan dengan Kasus Penyalahgunaan Wewenang yang terjadi di Bisnis Mikro KCP Pagongan, Cirebon.

2. Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi :

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan sehubungan dengan pengukuran dan pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

Selama tahun 2011, Komite Pemantau Risiko telah melakukan :

1. Meminta notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi secara reguler kepada Direktur terkait, sehubungan dengan

PBI 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan TI oleh Bank Umum yang menyatakan bahwa perlunya pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris terhadap manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

2. Memberikan saran-saran kepada Direksi untuk membuat peraturan internal dalam rangka memperbaiki kinerja Bank BNP dan menindaklanjuti temuan-temuan Bank Indonesia.
3. Memberikan saran-saran kepada Direksi agar memberikan bimbingan kepada departemen terkait untuk membuat check list dari arsip kredit untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan telah diisi dengan benar sebelum file kredit disetujui oleh Komite Kredit dan memiliki perawatan file kredit yang baik sebagai langkah awal untuk mengurangi NPL.
4. Mengingatkan beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dan tindaklanjut dari Direksi berdasarkan hasil rapat Komite Pemantau Risiko.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

- a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :
 - melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - ii. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan Nominasi :
 - menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada BOC untuk disampaikan kepada RUPS;
 - memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

- memberikan rekomendasi Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Dewan Komisaris.
- c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
- kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - prestasi kerja individual;
 - kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Selama tahun 2011, Komite Remunerasi telah melakukan :

Tanggal	Perihal
Maret 2011	Merekomendasikan usulan calon Presiden Komisaris yang baru, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Presiden Komisaris yang lama
Maret 2011	Merekomendasikan usulan Kenaikan Gaji Karyawan Tahun 2011.
Mei 2011	Merekomendasikan usulan perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian tantiem/bonus atas laba perseroan tahun buku 2010.
Mei 2011	Merekomendasikan perubahan susunan pengurus Bank untuk masa jabatan tahun buku yang berakhir tahun 2012.
Juli 2011	Merekomendasikan Usulan Perubahan Tunjangan Dinas dan Kesejahteraan Karyawan.

C. RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE

Selama tahun 2011, rencana dan realisasi program kerja Komite sebagai berikut :

1. Komite Audit

Rencana rapat : 13 kali dalam 1 tahun
 Realisasi rapat : 13 kali dalam 1 tahun

2. Komite Pemantau Risiko

Rencana rapat : 12 kali dalam 1 tahun
 Realisasi rapat : 11 kali dalam 1 tahun

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Rencana rapat : 12 kali dalam 1 tahun
 Realisasi rapat : 10 kali dalam 1 tahun

Efektivitas Rapat Komite

Rapat Komite terselenggara sesuai dengan kebutuhan Bank, dihadiri sekurang-kurangnya oleh 51% (lima puluh satu perseratus) dari seluruh anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan pihak Independen.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat-Rapat Komite:

1. Komite Audit

Selama tahun 2011 Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Tanggal	Agenda Rapat
23 Februari 2011	1. Membahas Laporan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan IV tahun 2010. 2. Membahas Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan IV tahun 2010.

01 Maret 2011	Pertemuan Komite Audit dengan KAP Hendrawinata Gani dan Hidayat.
17 Maret 2011	Rapat Internal Komite Audit.
25 Maret 2011	Pertemuan dengan KAP Hendrawinata Gani dan Hidayat.
29 April 2011	Membahas laporan realisasi hasil pemeriksaan SKAI Triwulan I tahun 2011
27 Mei 2011	Pembahasan rekomendasi Akuntan Publik dalam rangka evaluasi penilaian kinerja fungsi SKAI Bank dan fungsi audit intern atas penggunaan TI.
31 Mei 2011	Membahas isu-isu terkini Divisi Kepatuhan.
Tanggal	Agenda Rapat
11 Juli 2011	Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan umum dan khusus bidang IT Bank BNP oleh Bank Indonesia.
29 Juli 2011	Pembahasan realisasi rencana pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI Triwulan II tahun 2011
23 Agustus 2011	Pembahasan draft laporan Komite Audit Semester I tahun 2011.
17 Oktober 2011	Membahas Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Triwulan III tahun 2011.
17 Nopember 2011	Membahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum dan Khusus Bank Indonesia.
22 Desember 2011	1. Evaluasi Realisasi Program Kerja Komite Audit 2011. 2. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit 2012.

2. Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2011 Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali.

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
17 Januari 2011	1. Membahas pending matters Laporan Bulanan Manajemen Risiko – data bulan September 2010. 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko – data bulan Oktober 2010 oleh Divisi Manajemen Risiko. 3. Presentasi Laporan Manajemen Risiko – data bulan November 2010 oleh Divisi Manajemen Risiko.

31 Januari 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas pending matters Laporan Bulanan Manajemen Risiko – data bulan Oktober dan November 2010. 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko – data bulan Desember 2010. 3. Presentasi Laporan Profil Risiko Triwulanan IV tahun 2010 oleh Divisi Manajemen Risiko. 4. Membahas Hasil Temuan Pemeriksaan BI (IT) posisi 31 Desember 2010.
22 Februari 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pending matters Laporan Manajemen Risiko–data Desember 2010. 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko–data Januari 2011.
17 Maret 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pending matters Rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya. 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko, data Januari 2011.
Tanggal Rapat	Agenda Rapat
19 April 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pending matters Rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya. 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko–data Februari 2011.
23 Mei 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pending matters Rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya. 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko–data Maret 2011. 3. Presentasi Laporan Manajemen Risiko–data April 2011. 4. Presentasi Laporan Profil Risiko Triwulan I tahun 2011. 5. Sosialisasi BCP oleh Div Manajemen Risiko. 6. Presentasi Laporan dari Divisi Kepatuhan.
11 Juli 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pending matters Rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko–data Mei 2011.
29 Juli 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya. 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko – data Juni 2011 oleh Divisi Manajemen Risiko. 3. Presentasi Laporan Profil Risiko Triwulanan Posisi 30 Juni 2011 oleh Divisi Manajemen Risiko.
27 ktober 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas <i>pending matters</i> rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya. 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko – data Juli 2011 oleh Divisi Manajemen Risiko. 3. Presentasi Laporan Manajemen Risiko – data Agustus 2011 oleh Divisi Manajemen Risiko.

18 Nopember 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas <i>pending matters</i> rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya. 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko – data September 2011 oleh Divisi Manajemen Risiko. 3. Presentasi Laporan Manajemen Risiko – data Oktober 2011 oleh Divisi Manajemen Risiko.
22 Desember 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas <i>pending matters</i> rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya. 2. Presentasi Laporan Manajemen Risiko – data November 2011 oleh Divisi Manajemen Risiko.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2011 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
11 Februari 2011	Pembahasan Kenaikan Gaji Karyawan Tahun 2011.
Tanggal Rapat	Agenda Rapat
11 Maret 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Agenda untuk RUPS (diskusi nominasi calon Presiden Komisaris). 2. Pembahasan Program Pelatihan Karyawan 2011. 3. Pembahasan Usulan Kenaikan Gaji Karyawan 2011(II). (Pending Matters rapat sebelumnya).
08 April 2011	Pembahasan Usulan Kenaikan Remunerasi/Tantiem BOD-BOC (1).
12 Mei 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Akhir Usulan Remunerasi BOD & BOC Tahun 2011 – 2012. 2. Pembahasan Nominasi BOD & BOC Tahun 2011 – 2012.
10 Juni 2011	Pembahasan Tunjangan Dinas dan Kesejahteraan Karyawan (1)
15 Juli 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan pending matters rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebelumnya (10 Juni 2011). 2. Pembahasan Tunjangan Dinas dan Kesejahteraan Karyawan (2).
19 Agustus 2011	Pembahasan pension fund BOD dan BOC.
07 Oktober 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan <i>pension fund</i> karyawan. 2. Pembahasan struktur gaji karyawan.

11 Nopember 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif / Bonus Karyawan 2011. 2. Model Car Ownership Program (COP).
09 Desember 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2011. 2. Skema Insentif/ Bonus Karyawan.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan Benturan Kepentingan telah dijelaskan dalam Kebijakan Kepatuhan, yang harus dipatuhi oleh setiap Pengurus dan Karyawan Bank, yang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia, BAPEPAM dan LK, dan Anggaran Dasar Bank.

Keputusan strategis Bank BNP telah melalui beberapa pertimbangan aspek Benturan Kepentingan, diungkap, diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian dan/atau merugikan keuntungan Bank. Apabila terdapat Transaksi Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Bank BNP, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1. perihal : Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, kerangka kerja pengelolaan budaya dan risiko kepatuhan Bank BNP mengacu pada *“the three line of defense model”* sebagai kerangka kerja pengelolaan pengendalian internal dimana lini pertahanan pertama (*first line of defense*) berada pada seluruh karyawan dari unit kerjayang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha bank dimana setiap pelaksanaan tugas tersebut senantiasa dilakukan dalam koridor kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku serta kebijakan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Divisi Kepatuhan sebagai lini pertahanan kedua (*secondline of defense*) memiliki kewajiban untuk menyiapkan dan memastikan tersedianya berbagai dukungan bagi pelaksanaan tugas dari lini pertama antara lain: Menyusun kerangka kerja dan kebijakan Kepatuhan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak sertameningkatkan kualitas pemahaman dan implementasi terhadap Ketentuan Kehati-Hatian (*Prudential Banking*), Ketentuan Kelembagaan dan Kepengurusan, Ketentuan *Self Regulatory Banking* (SRB), Ketentuan Pembiayaan, serta Ketentuan Lainnya dan juga secara simultan meningkatkan kualitas infrastruktur/ pendukung agar tujuan meningkatkan budaya kepatuhan dapat terwujud. Sedangkan realisasi/ pelaksanaan atas kebijakan yang telah dirumuskan diimplementasikan dan dilakukan melalui unit kerja pendukung di level departemen yang terdiri :

A. Regulatory Compliance Department

Melakukan *advise*, sosialisasi dan edukasiperaturan eksternal dengan melaksanakanidentifikasi dan pemantauan serta pelaporanrisiko kepatuhan, demikian juga denganmemfokuskan area regulasi yang memiliki peranstrategis meliputi :

- Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) seperti BMPK, GWM, PDN,Transparansi Kondisi Keuangan Bank, sertaTranparansi & Informasi Produk Bank)
- Pemantauan atas transaksi yang memiliki risiko kepatuhan tinggi;
- Pemantauan/ *monitoring* laporan-laporan wajib kepada pihak regulator & pihak eksternal lain sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Operational System & Procedure Department

Menyediakan dan melakukan pengembanganatas sistem dan prosedur internal, antara lainmeliputi: memberikan dukungan terhadappelaksanaan Produk atau Aktivitas Baru (PAB),Implementasi PSAK 50/55, dan berbagaikebijakan operasional dan usaha bank lainnya serta melaksanakan sosialisasi terhadapberbagai ketentuan/ kebijakan internal baikmerupakan revisi maupun yang baru.

C. Anti Money Laundering/ Combating the Financing Terrorism (AML/CFT) Department

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15/2002 jo UU25/2003, maka Bank BNP sebagai bagian dari komunitas dunia turut aktif dalam memberantas kegiatan/ praktek-praktek pencucian uang yang marak terjadi. Bank BNP melakukan upaya untuk terlebih dahulu mengenal nasabah sebelum melakukan hubungan transaksi dengan Bank BNP melalui penerapan *Know Your Customer* (KYC).

Memastikan pelaksanaan pengkinian data/dokumentasi nasabah berjalan dengan baik dan melakukan upaya untuk pengembangan aplikasi pendukung dan *set up parameter (red flag)* untuk menentukan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD) sesuai PBI terbaru tentang AML/ CFT, disamping itu untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi karyawan dilakukan pelatihan/sosialisasi karyawan terhadap perubahan PBI terbaru (dari KYC/ AML menjadi AML/ CFT). Seluruh kegiatan pemantauan program Anti Pencucian Uang yang dilaksanakan di Bank BNP dikoordinasikan dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan prosedur operasional yang telah disusun dan disetujui oleh Direksi.

D. Credit Policy & Procedure Department

Memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan, *review* dan mengembangkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang telah berlaku di Bank BNP termasuk memberikan dukungan pengembangan kebijakan kredit yang dikembangkan oleh unit terkait perkreditan, pengajuan Produk/Aktivitas Baru (PAB), sosialisasi pemahaman user terhadap prosedur dan regulasi perkreditan, memastikan pelaksanaan kredit telah sesuai dengan KPB serta mengkoordinasikan terselenggaranya Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).

VI. PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank BNP dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dimana :

1. SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan mempunyai akses langsung kepada Komite Audit yang menjamin agar SKAI dapat melaksanakan tugas secara independen dan memberikan konsultasi atas rencana proses pemeriksaan yang dilakukan.
2. Secara teratur SKAI bertemu dengan Komite Audit dan Manajemen untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi SKAI yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan telah dilaksanakan dengan benar dan diselesaikan tepat pada waktunya.
3. SKAI mengimplementasikan sebuah metodapendekatan audit berdasarkan risiko (*risk based audit*), dimana kegiatan *audit* diprioritaskan menurut penilaian dari potensi eksposur terhadap risiko, termasuk delapan tipe risiko perbankan yang dirumuskan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam melaksanakan kegiatan auditnya, Satuan Kerja Audit Intern berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), yang merupakan bagian dari Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan juga praktik perbankan internasional yang terbaik, sehingga diharapkan kualitas audit dapat memenuhi atau bahkan melampaui standar praktik profesional.

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Akuntan Publik melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Bank BNP setiap tahunnya. Akuntan publik ditetapkan berdasarkan RUPS setelah direkomendasikan oleh Komite Audit. RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juni 2011 menugaskan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk mencalonkan akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank BNP untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dewan Komisaris Nomor 036-KOM/2011 telah disetujui Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (*member of Grant Thornton International*) untuk melakukan pemeriksaan umum Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2011.

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

IMPLEMENTASI STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris & Direksi telah tertuang didalam 'Kebijakan Manajemen Risiko', dimana pada tanggal 30 Desember 2011 Dewan Direksi Bank BNP telah mengajukan persetujuan perubahan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan SE BI no.13/23 DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang 'Perubahan atas Surat Edaran no.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum' kepada Dewan Komisaris.

Dalam implementasi strategi manajemen risiko, selain memberikan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko, Dewan Komisaris juga mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris seperti setiap pemberian atau penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Direksi terlibat sebagai anggota tetap dalam Komite Manajemen Risiko yang membantu Dewan Direksi dalam menyusun kebijakan manajemen risiko dan cukup aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi berkaitan dengan manajemen risiko secara periodik dalam forum meeting *Board of Director* (BOD).

Review terhadap kecukupan penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala yang dilakukan melalui rapat rutin *Board of Director* (BOD) dan Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan berdasarkan SK Nokep. 035-DIR/10/2009 tentang Pengangkatan Komite Manajemen Risiko.

Monitoring yang dilakukan oleh BoD dalam rapat rutin BoD di antaranya mencakup : Perkembangan rasio NPL; Kosentrasi kredit; Pelaksanaan Disaster Recovery Site (DRS); Perkembangan Operasional Risk Even; Simulasi Call Tree; Masalah

insiden operasional yang signifikan; Pemetaan Penggunaan Sumber Dana dengan Conversion of Funds Approach; Efektifitas penggunaan sumber dana (excess liquidity); Perkembangan rasio NPL; LDR Valas, ALCO, dll.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur & Penetapan Limit

Selama tahun 2011, beberapa kebijakan, prosedur & limit yang telah disetujui oleh Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris diantaranya : Kebijakan Manajemen Risiko; penyesuaian parameter profil risiko & Risk Based Bank Rating (RBBR) ~ dimana berdasarkan hasil *self assessment risk profile* di triwulan 4/2011 secara komposit adalah *low risk* dan tingkat kesehatan bank (RBBR) adalah peringkat 2.

Kebijakan lainnya setingkat Surat Keputusan (SK) Direksi terkait pengelolaan risiko diantaranya tentang : Sistem Pengendalian Internal (SPI); IRR Gap; Liquidity Maturity Ladder; Standarisasi Kode Group Transaksi, Group Buku Besar & Limit Transaksi Operasional Kantor Cabang; Penetapan Asset Liability Management Committee (ALCO); Wewenang Pemutus Kredit Konsumer; Penetapan Ratio Loan to Value (LTV); Pemutus Kredit Bisnis Mikro.

C. Organisasi

1. Divisi Manajemen Risiko terdiri dari 2 (dua) Departemen yaitu Departemen Risiko Kredit & Market serta Departemen Risiko Operasional & SI. Divisi Manajemen Risiko merupakan Divisi yang berdiri sendiri atau independen terpisah dari proses operasional bank dan terpisah dari fungsi kontrol lainnya yaitu Divisi Kepatuhan dan SKAI.
2. Divisi Manajemen Risiko mengkoordinir pengelolaan 8 (delapan) risiko secara independen dengan sumber daya cukup berkualitas dengan keseluruhan jumlah personil sebanyak 10 personil untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko. Dari 10 (sepuluh) personil tersebut terdapat 1 (satu) personil yang mengundurkan diri dari Departemen Risiko Operasional & Sistem Informasi.
3. Sesuai dengan Man Power Planning tahun 2010, Divisi Manajemen Risiko membutuhkan sebanyak 4 (empat) orang specialist, namun sampai dengan akhir Desember 2011 baru terpenuhi 1 (satu) orang specialist untuk ditempatkan pada Departemen Risiko Operasional & SI, sisanya masih dalam proses pencarian.

D. Budaya Sadar Risiko

Budaya sadar risiko dilakukan dengan berbagai cara dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Manajemen melalui Divisi Manajemen Risiko. Menanamkan budaya sadar risiko bukan merupakan hal yang mudah, perlu usaha dan perhatian secara bersama serta bertahap agar kesadaran akan risiko tumbuh dengan baik di lingkungan Bank BNP.

Upaya yang dilakukan untuk menanamkan dan mengembangkan budaya sadar risiko diantaranya dengan memberikan pemahaman melalui berbagai training diantaranya training BSMR, inhouse training untuk berbagai fungsi seperti forum SODP, MEDP, Teller, Customer Service, dll. Langkah lainnya adalah melalui sharing informasi terkait risiko melalui meeting internal antar unit kerja, publikasi operational risk news, compliance news, dll.

E. Proses Manajemen Risiko (Pengelolaan 8 Risiko)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, proses manajemen risiko di Bank BNP juga telah melalui beberapa tahap yaitu mulai dari pengindentifikasian, pengukuran risiko, pemantauan serta pelaporan risiko kepada Manajemen Senior dan Direksi Bank.

Beberapa laporan yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko dan digunakan sebagai alat untuk monitoring, yaitu :

1. Risiko Kredit

Pemantauan tingkat kolektibilitas dan NPL dilakukan melalui *weekly monitoring* dengan konsentrasi pada debitur dengan kolektibilitas 2 (*Special mention*) sebagai tindakan preventif agar tidak masuk dalam kategori NPL;

Top 50 dan 100 debitur, 15 debitur inti diluar pihak terkait, Rasio data agunan kredit, Sektor ekonomi; Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Selama tahun 2011, Divisi Management Risiko tengah melakukan simulasi *Internal Credit Rating* dalam rangka untuk mendapatkan *Probability of Default*, yang akan digunakan secara efektif pada bulan Januari 2012, dan hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BOD.

Divisi Manajemen Risiko telah membantu dengan memberikan simulasi perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SDBK) sesuai dengan format Bank Indonesia untuk kepentingan *supporting* data di ALCO.

Selain itu Divisi Manajemen Risiko turut serta dalam Komite Kebijakan Perkreditan khususnya antara lain dalam : Penetapan Segmentasi Bisnis secara internal untuk Usaha Korporasi, Komersil, Ritel (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro). Menetapkan *collateral coverage rasio (Loan to Value)* dalam kebijakan perkreditan serta melakukan *study banding* ke Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Jakarta Branch untuk mendapatkan gambaran dan metode serta kebijakan dan prosedur monitoring transaksi di treasury.

2. Risiko Pasar & Likuiditas

Perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit & risiko pasar; Posisi PDN & GWM; Rasio LDR; Rasio Komposisi Deposan Inti terhadap DPK; Rasio Komposisi Antar Bank Passiva terhadap total dana; Rasio Komposisi *One Month Maturity Mismatch*; Rasio Kemampuan Likuiditas; Stress Test Likuiditas; Interest Rate Sensitivity Analysis, dll.

Selama periode semester II/2011, Divisi Manajemen Risiko telah ikut serta dalam *Team Support ALCO* dengan menginformasikan *Liquidity Maturity Gap* Bank, baik dalam keadaan normal maupun hasil *stress testing* dalam kondisi ekstrim, dan mensimulasikan data *projection* (Funding & Lending) dari Divisi Bisnis untuk satu bulan kedepan.

Selain itu Divisi Manajemen Risiko melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam rapat bulanan BOD telah memberikan kajian risiko likuiditas berupa usulan seperti :

1. Pemetaan dan Penggunaan Sumber Dana dengan *Conversion of Funds Approach*.
2. Efektifitas penggunaan sumber dana (*Excess Liquidity*) dalam upaya mengoptimalkan pendapatan bunga.

3. Simulasi perhitungan KPMM dengan asumsi *Subordinated Loan* untuk mendukung RBB sampai dengan tahun 2013.
4. Memberikan informasi *Liquidity Maturity Gap* dalam kondisi bisnis normal, dan melakukan *stress tesing* dalam kondisi ekstrim.

3. Risiko Operasional & Sistem Informasi

Monitoring dilakukan dengan memperhatikan rasio kesalahan pemrosesan, jumlah kerugian finansial dan laporan *self assessment* risiko operasional atas insiden operasional (*Orient report*) yang dikirimkan oleh unit kerja.

Selama tahun 2011, aktivitas yang telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dalam fungsinya melakukan *life cycle risk management*, diantaranya adalah :

- a. Memberikan edukasi mengenai pemahanan risiko operasional dalam aktivitas harian bank yang ditujukan bagi Petugas Mikro dalam forum Management Training Micro Banking (MTMB), forum Service Officer Development Program (SODP); forum Teller & Customer Service Officer.
- b. Melakukan sosialisasi *Business Contingency Plan* (BCP) kepada seluruh Service Officer (SO) di seluruh Kantor Cabang secara serentak pada tanggal 14 Mei 2011 dan kepada seluruh Kepala Divisi pada tanggal 20 Mei 2011.
- c. Melakukan Simulasi *Call Tree* yang melibatkan seluruh karyawan termasuk Direksi secara serentak pada tanggal 11 Juni 2011.
- d. Melakukan kerjasama dengan unit kerja terkait yang mengkoordinir *project* pembenahan menu user untuk dilakukan standarisasi menu user dari kode group transaksi, kode group buku besar serta penetapan limit transaksi bagi seluruh frontliner. Standarisasi ini telah dituangkan ke dalam Surat Keputusan (SK) & Surat Edaran (SE) Direksi pada bulan Juni 2011.
- e. Saat ini Divisi Manajemen Risiko juga terlibat di dalam project *Establishment Review Internal Control Activity* (ERICA) sebagai *team task force* bersama Divisi lainnya yaitu Compliance Division, IT Division, Service Division, HR & GA Division, Finance & Accounting Division, Unit Control dan SKAI dengan tujuan menyusun kerangka Kebijakan Sistem

Pengendalian Internal (SPI), meminimalkan terjadinya insiden fraud serta menindaklanjuti surat Bank Indonesia tanggal 14 April 2011 tentang Peningkatan Sistem Pengendalian Risiko & Internal Kontrol.

- f. Melakukan pembinaan, edukasi dan pelaksanaan simulasi *Emergency Response Role Play* (ERRP) secara berkala dan bertahap, pada tanggal 12 November 2011 telah dilakukan tanggap darurat di KCP Pajajaran dengan skenario kebakaran sedang. Simulasi ini dilakukan perekaman melalui video dan dituangkan dalam bentuk *compact disk* untuk diperbanyak dan didistribusikan kepada seluruh kantor cabang.
- g. Melakukan proses penilaian *Business Impact Analysis* (BIA) sebagai bagian dari *Business Continuity Management* (BCM) khususnya pada Divisi Operasional. *Output* dari proses BIA ini adalah dapat ditentukan penilaian level kritikal dari masing-masing fungsi (*critical business function*) didalam Divisi Operasional.

4. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang muncul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi sebagai akibat ketidakmampuan Bank memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti kecukupan modal, rasio NPL, Batas Maksimum Pemberian Kredit, batasan nilai tukar mata uang, dan lain-lain Bank Nusantara Parahyangan secara khusus telah membentuk Divisi Kepatuhan yang berperan aktif memantau kesesuaian seluruh kegiatan di lingkungan Bank BNP dengan peraturan dan perundangan eksternal serta prosedur internal. Selain itu, fungsi pemantauan kepatuhan Bank BNP juga menjadi tanggungjawab Direktur Kepatuhan, Divisi Audit Internal, dan Manajemen Risiko.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelemahan sistem yuridis atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan hukum yang jelas dan mendukung, atau adanya kelemahan dalam kontrak, klaim, atau agunan.

Risiko hukum dikelola untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank Nusantara Parahyangan dengan pihak ketiga telah didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank BNP dari segi hukum.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan Corporate Legal dibawah koordinasi Divisi Corporate Secretary serta unit legal yang berada dibawah koordinasi Credit Support Division. Pemantauan terhadap risiko hukum juga menjadi bagian dari tugas Risk Management Division.

6. Risiko Strategi.

Risiko strategis mengacu pada risiko yang disebabkan oleh adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, atau kegagalan Bank dalam merespon perubahan-perubahan eksternal.

Bank Nusantara Parahyangan mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul dari adanya pemberitaan negatif terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif mengenai Bank BNP.

Untuk menjaga dari pemberitaan dan persepsi negatif, Bank Nusantara Parahyangan secara rutin melakukan pemantauan berita yang berhubungan dengan Bank BNP dalam berbagai media yang dilakukan oleh Corporate Secretary untuk menghindari terulangnya kasus serupa.

Selain itu, mengingat risiko reputasi ini bukan merupakan risiko yang dikelola secara terpisah dari risiko-risiko lainnya, khususnya bagi bank dengan kompleksitas usaha yang tinggi, maka pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses manajemen risiko yang akurat dan komprehensif.

Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*):

Yang dimaksud dengan fraud ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank BNP senantiasa mengembangkan kebijakan dan prosedur penanganan *fraud* dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang telah diberlakukan pada 9 Desember 2011.

Berikut jumlah kasus (*internal fraud*) dan permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2011, yang mana hal tersebut telah disampaikan kepada Bank Indonesia yang disajikan dalam tabel berikut di bawah ini:

Internal Fraud dalam tahun 2011 (dengan kerugian > Rp 100 juta)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2010	Tahun 2011
Jumlah <i>fraud</i>	-	-	1	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti oleh proses hukum	-	-	-	-	-	-

Internal fraud yang terjadi tidak mengakibatkan kerugian keuangan bagi Bank BNP ataupun bagi Nasabah

Permasalahan Hukum Tahun 2010	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
T o t a l	-	NIHIL

Transaksi – Transaksi dengan Pihak Terafiliasi :

Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan para pihak terafiliasi dengan Bank BNP diantaranya adalah: transaksi yang berkaitan dengan kegiatan utama Bank BNP seperti Kredit, Simpanan, Sewa Menyewa beberapa gedung perkantoran yang digunakan untuk Operasional Bank BNP sehari-hari, dimana seluruh transaksinya berkaitan dengan kegiatan utama (*core business*) Bank BNP, dan apabila transaksi tersebut dikategorikan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka telah mendapat persetujuan RUPS sebagaimana ketentuan yang mengaturnya. Guna menjaga agar transaksi-transaksi tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum maupun praktektata kelola perusahaan yang baik, seluruh ketentuan dan persyaratan yang dikenakan berlaku umum dan tidak ada pengecualian dan secara nilai tidak memenuhi unsur transaksi yang bersifat material.

Buy back shares & buy back obligasi Bank :

Bank BNP tidak melakukan *buy back shares* dan *buy back* obligasi dalam upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank BNP yang dilakukan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi yang diterbitkan.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Social dan Kegiatan Politik :

Selama tahun 2011 Bank BNP menyumbangkan dana dalam rangka social dalam kegiatan :

Bulan	Program CSR	Nominal Dana
April 2011	Pengadaan Sarana Air Bersih dan Sarana MCK di Kabupaten Lebak - Propinsi Banten	Rp.12.000.000,-

Juli 2011	Pelatihan ESQ Meraih Impian Anak Negeri untuk seribu Anak Yatim dan Anak Jalanan di Bandung	Rp. 7.000.000,-
Juli 2011	Malam Amal Penggalangan Dana Untuk Korban Gempa di Tapanuli, Posko Jawa Barat - Bandung	Rp. 2.000.000,-

Selama tahun 2011 Bank BNP tidak memberikan dana yang bertujuan untuk kegiatan politik baik secara nasional, daerah, maupun organisasi politik di sekitar wilayah setempat.

Kegiatan Edukasi Perbankan & Ayo Ke Bank.

Sebagai pelaksanaan dari tanggung jawab sosial Perbankan untuk mengedukasi masyarakat bahwa pengetahuan akan transaksi perbankan menjadi sangat penting dalam era globalisasi ekonomi ini, Bank BNP telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat memberikan pemahaman dan pengejawantahan mengenai kegiatan perbankan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti pelajar dan mahasiswa.

Pelaksanaan edukasi ini dilaksanakan dengan beberapa metode penyampaiannya itu baik melalui penyebaran flier produk perbankan di sekolah maupun pada kegiatan – kegiatan ekstra di luar sekolah, serta mengadakan acara edukasi sekaligus sosialisasi tabungan di sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pengetahuan akan manfaat menabung bagi generasi muda khususnya pelajar.

Pada tanggal 20 Juni 2011, telah dilaksanakan program Edukasi Perbankan dan sosialisasi Program Tabunganku untuk pelajar di SMAN 1 Bale Endah Kabupaten Bandung. Selanjutnya acara serupa dilaksanakan juga untuk pelajar tingkat Sekolah Dasar, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2011 di SD Pandu, Bandung dan pada tanggal 15 Desember 2011 di SDN Gadis 1 Ciparay, Majalaya, Kabupaten Bandung.

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Pada dasarnya dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur, Bank BNP senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dalam hal ini peraturan Bank Indonesiakhususnya mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Selama tahun 2011 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank BN.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (dalam jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	22	*) 48.926
2.	Kepada Debitur inti **)	15	840.968
	a. Individu	3	155.077
	b. Group	12	685.891

*) Nominal Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait adalah sebesar 9% dari Modal Bank BNP, sebagian besar dijamin dengan cash colateral

**) Berdasarkan Format Laporan ke Bank Indonesia terhadap 15 Debitur Inti

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE dan PELAPORAN INTERNAL

A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Bank BNP telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam :

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan yang dimaksud antara lain mencakup:

- a. Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank BNP dan Kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Bank BNP telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan terkait. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang Anggota Direksi yang pengumumannya dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank BNP.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Bank BNP menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di *website* Bank Indonesia.

4. Laporan Non Keuangan Bank

Memberikan informasi mengenai produk Bank BNP secara jelas, akurat dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh

nasabah seperti *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang Bank BNP pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

Selain itu Bank BNP mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* dan Bank Indonesia.

Bank BNP memenuhi kewajiban dalam :

- a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
- b. Melaksanakan dan menginformasikan tentang tatacara Pengaduan Nasabah yang dapat disampaikan langsung melalui petugas Customer Service di setiap kantor cabang terdekat, ataupun melalui sarana elektronik yang disampaikan melalui email

pengaduan.nasabah@bankbnp.com; serta penyelesaian Sengketa kepada Nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

c. Pemenuhannya sebagai badan usaha publik untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan media www.bankbnp.com

d. Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Konsultan.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/8/PBI/2007, tanggal 13 Juni 2007, tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, maka Bank BNP mempekerjakan 6 (enam) orang tenaga kerja asing yang berasal dari negara Jepang dan telah mendapatkan ijin bekerja dari Departemen Tenaga Kerja masing-masing bertindak sebagai manajemen yaitu Presiden Komisaris (Yasuo Uonomi), Presiden Direktur (Ritsuo Ando) dan Direktur (Koji Sawada) dengan masa kerja sesuai batas waktu pengangkatannya melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam mengembangkan bisnis khususnya untuk Kredit Tanpa Agunan (KTA) juga telah menggunakan 2 (dua) orang tenaga asing dari Jepang yaitu Hitoshi Yokohama dan Tetsuji Sakioka sebagai senior advisor & advisor, serta seorang pejabat eksekutif (Shigeo Morimoto) yang bertugas sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko. Penggunaan ketiga tenaga asing tersebut berkaitan dengan kebutuhan Bank BNP saat ini yang masih memerlukan arahan dan alih pengetahuan atas kegiatan tersebut diatas

B. KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM, REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI, DAN RASIO GAJI TERTINGGI ATAU TERENDAH

1. Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Nusantara Parhyangan Tbk.

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Kepemilikan
1.	ACOM CO., LTD.	251.180.469	60,31 %
2.	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	63.310.000	15,20 %

3.	PT. Hermawan Sentral Investama, PT	38.736.130	9,30 %
4.	PT. Hermawan Ladang Arta, PT	23.741.500	5,70 %
5.	Lainnya/ Publik	39.545.059	9,49 %
	Total Saham	416.513.158	100,00%

No.	Ultimate Shareholders	Pemegang Saham Pengendali
1.	Keluarga Kinoshita	ACOM CO., LTD.
2.	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ. Ltd.

2. Data Kepemilikan Saham

Dewan Komisaris

Posisi: 31 Desember 2011

Nama	Jabatan	KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR						
		PT BNP Tbk	Bank Lain		Lembaga Keuangan Bukan Bank		Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri	
		(dalam lembar)	Nama Bank	Jumlah Saham	Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Nama Perusahaan	Jumlah saham
1. Yasuo Uonomi	Presiden Komisaris	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2. Tatang Hermawan	Komisaris	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PT. Hermawan Sentral Investama PT. Hermawan Ladang Arta PT. Lembang Asri PT. Hermawan Megah Sentral PT. Bina Nusantara Prima	25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 27,50%
3. Karel Tanok	Komisaris Independen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4. Abdul Malik Sugiarto	Komisaris Independen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

5. Bachtiar Alam	Komisaris Independen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
------------------	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Direksi

Posisi: 31 Desember 2011

Nama	Jabatan	KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR						
		Bank BNP	Bank Lain		Lembaga Keuangan Bukan Bank		Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri	
		(dalam lembar)	Nama Bank	Jumlah Saham	Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Nama Perusahaan	Jumlah Saham
1. Ritsuo Ando	Presiden Direktur	N/A	N/A		N/A		N/A	
2. Budi T Halim	Direktur Bisnis	N/A	N/A		N/A		N/A	
3. Koji Sawada	Direktur Perencanaan dan Keuangan	N/A	N/A		N/A		N/A	
4. Markus Sugiono	Direktur Operasional & IT	N/A	N/A		N/A		N/A	
5. Afandi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko	N/A	N/A		N/A		N/A	

Pejabat Eksekutif

Posisi: 31 Desember 2011

Nama	Jabatan	KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR						
		PT BNP Tbk.	Bank Lain		Lembaga Keuangan Bukan Bank		Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri	
		(dalam lembar)	Nama Bank	Jumlah Saham	Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Nama Perusahaan	Jumlah Saham
1. Maria Ida Ratnawati R.	Ka.Div.Kredit Tanpa Agunan	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
2. Kevin Cahyadi Tatang	Ka.Div.Penjualan & Distribusi I	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
3. Lius B. Nugroho	Ka.Div.Penjualan & Distribusi II	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
4. Sintawati Luswanto	Ka.Div.Penjualan&Distribusi IV	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	

5. Mario Yahya	Kab.Div.Perencanaan & Sekretaris Perusahaan	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
6. Yanto Setiawan	Ka.Div. Administrasi Kredit	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
7. Hardi Widjaja	Ka.Div. Treasury	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
8. Agung Subagiyo	Ka.Div. SDM	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
9. Tjie Khong Fen	Ka.Div. IT	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
10. Franciskoes Heri	Ka.Div. Akuntansi dan Keuangan	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
11. Bonny Wahyudi	Ka.Div. Pengembangan Bisnis	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
12.. Gina Dharma	Ka.Div.Bisnis Konsumer	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
13. Tomas Sugiono	Ka.Div. Bisnis Mikro	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	

Nama	Jabatan	KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR						
		PT BNP Tbk.	Bank Lain		Lembaga Keuangan Bukan Bank		Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri	
		(dalam lembar)	Nama Bank	Jumlah Saham	Nama Perusa-haan	Jumlah Saham	Nama Perusa-haan	Jumlah Saham
14. Susiliana	Ka. Div. Operasional	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
15. Rosep T. Lesmana	Ka. SKAI	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
16. Purbaji Basuki	Ka. Div. Kepatuhan	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
17. Shigeo Morimoto	Ka. Div. Manajemen Risiko	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	

18. Budijanto Suryadi	Ka. Div. Service	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
-----------------------	------------------	-----	-----	--	-----	-----	-----	--

3. Paket / Kebijakan, Rasio Tertinggi /Terendah Remunerasi & Fasilitas Lain bagi Anggota Dewan komisaris & Direksi Tahun 2011

a. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya:

Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya	Jumlah diterima dalam 1 thn			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	jutaan Rp.	orang	jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem & lainnya dalam bentuk non-natura	5	1.687	5	9.377
Fasilitas lain dalam bentuk natura (pemenuhan, transportasi, asuransi kesehatan & dsbnya) yang*) :				
a. dapat dimiliki	5	103	5	792
b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
TOTAL	10	1.790	10	10.169

*) dinilai dalam ekuivalen rupiah

b. Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Total Gaji Pegawai :

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Total Gaji Pegawai	
Rasio Gaji Karyawan Tertinggi & Terendah	26,57
Rasio Gaji Direksi Tertinggi & Terendah	3,16
Rasio Gaji Komisaris Tertinggi & Terendah	1,38
Rasio Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tertinggi	3,76

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas Rp. 2 miliar	2	
diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	3	
diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar		4
Rp. 500 juta kebawah		1

*) Jenis & Jumlah Remunerasi diambil dari tabel Gaji & Fasilitas Komisaris & Direksi

Keterangan *)	Gaji Tertinggi	Gaji Terendah	Rasio
Rasio Gaji Karyawan Tertinggi & Terendah	39.860.816	1.500.000	26,57
Rasio Gaji Direksi Tertinggi & Terendah	150.000.000	47.500.000	3,16
Rasio Gaji Komisaris Tertinggi & Terendah	31.000.000	22.500.000	1,38
Rasio Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tertinggi	150.000.000	39.860.816	3,76

*) Jenis & Jumlah Remunerasi diambil dari tabel Gaji & Fasilitas Komisaris & Direksi

Share option

Bank BNP tidak terdapat opsi (*Share option*) untuk membeli saham yang dilakukan oleh anggota Dewan komisaris, Dewan Direksi, dan Pejabat Eksekutif lainnya yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota dewan Komisaris, Dewan Direksi, atau Pejabat Eksekutif Bank BNP, dan telah diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran dasar Bank BNP

C. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

1. Bank BNP dalam menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dengan isi dan cakupan yang sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan telah :
 - a. Mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya atau sesuai dengan hasil *self assesment* bank
 - b. Melampirkan hasil *self assesment* bank.
3. Apabila didapati perbedaan predikat dalam penilaian hasil *self assesment* dengan hasil pengawasan atau pemeriksaan Bank Indonesia, maka Bank BNP bersedia untuk :
 - a. Merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil *self assesment* dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasipada periode yang terdekat
 - b. Menyampaikan revisi hasil *self assesment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara lengkap kepada Bank Indonesia.
4. Bank BNP menyampaikan laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak :
 - a. Bank Indonesia
 - b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
 - c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia
 - d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia
 - e. LPPI
 - f. 2 (dua) Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - g. 2 (dua) majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.

D. PELAPORAN INTERNAL

Bank BNP berupaya untuk melakukan penyempurnaan informasi dan sistem keamanan teknologi, serta secara bertahap melakukan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas.

Kecukupan Pelaporan Internal berarti :

1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh *System Information Management (SIM)* yang cukup memadai,
2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan disajikan tepat waktu,
3. Terdapat Sistem Informasi yang cukup memadai yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang cukup kompeten dalam bidangnya.

XI. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank, menuntut komitmen yang kuat dari seluruh elemen organisasi Bank BNP, karena didalamnya tercakup sasaran, kebijakan dan strategiserta *goals* yang akan dan harus dicapai perusahaan dalam jangka waktu pendek dan menengah. Arah dan kebijakan strategis Perusahaan pada tahun 2011 yang telah dituangkan di dalam Rencana Bisnis Bank mencakup pemenuhan diantaranya :

1. Menjadikan Bank BNP sebagai Bank Ritel yang berskala nasional sesuai dengan visi Bank BNP termasuk didalamnya perluasan jaringan kantor dan peningkatan kompetensi dan servis atas *core business bank*;
2. Menjaga dan terus meningkatkan tingkat kesehatan Bank dan daya tahan terhadap gejolak perekonomian yang berimbas pada industri perbankan;
3. Strategi yang fokus dalam menjalankan bisnis mikro dan kecil;
4. Meningkatkan peran serta Bank BNP dalam bertindak sebagai Mitra Utama Dunia Usaha;

5. Menyempurnakan dan selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG di semua unit usaha serta mampu menjaga permodalan bank. Pemantauan dan kontrol atas pelaksanaan rencana strategis yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dilakukan secara berkala melalui rapat Direksi yang mengagendakan realisasi atas Rencana Bisnis Bank.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Tahun 2011 ini kami sampaikan.

Bandung, Mei 2012

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Kantor Pusat

Karel Tanok
Komisaris Independen

Ritsuo Ando
Presiden Direktur

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
Self Assesment Good Corporate Governance
Tahun 2011

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.200	Jumlah, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris yang berkewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG diwujudkan dengan melaksanakan peran pengawasan yang lebih aktif dan efektif, serta memberimasukan / rekomendasi kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan nukurandankompleksitas usaha Bank BNP
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	1	0.200	Jumlah, integritas, independendankompetensi anggota Dewan Direksi untuk menjalankan operasional dan usaha Bank BNP telah diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, berjalansangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. Selamat tahun 2011 tidak terdapat pelanggaran ketentuan/perundangan yang berlaku
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	1	0.100	Bank BNP telah memiliki semua Komite yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, dan telah melaksanakan fungsinya secara lebih optimal dan efektif dalam memberikan rekomendasi yang dipergunakan sebagai acuan keputusan Dewan Komisaris
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.200	Bank BNP telah memiliki kebijakan & prosedur penanganan benturan kepentingan agar tidak merugikan dan mengurangi keuntungan Bank serta terdokumentasikan dengan baik untuk setiap keputusan yang dilengkapi dengan risalah rapat

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2	0.100	Penerapan fungsi kepatuhan di Bank BNP terus menerus dilakukan baik terhadap aktivitas operasional maupun terhadap adapusaha Bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalisasi pelanggaran, hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan umum tahun 2011 yang tidak terdapat pelanggaran yang signifikan serta pemenuhan setiap komitmen yang telah dibuat.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2	0.100	Pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank BNP telah berjalan lebih efektif, independent dan obyektif yang berpedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1	0.050	Pelaksanaan fungsi Audit Eksternal Bank BNP telah berjalan dengan independent serta telah sangat efektif sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan, dengan menghasilkan kualitas dan cakupan hasil audit yang sangat baik
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	2	0.150	Fungsi manajemen risiko Bank BNP telah lebih efektif melakukan peran dan fungsinya dalam sistem pengendalian internal yang komprehensif dengan melakukan pengkinian kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sesuai dengan regulasi, tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50%	2	0.150	Bank BNP telah memiliki kebijakan tertulis yang up to date. Tidak terdapat pelanggaran ataupun pelanggaran BMPK, diversifikasi penyediaan dana yang cukup merata serta pengambilan keputusan dalam penyediaan dan adil dilakukan secara independent

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
10	Transparansi Kondisi Keuangan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.00%	2	0.300	Bank BNP telah melakukan transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan maupun non keuangannya kepada public secara tepat waktu, lengkap, akurat, kinidanutuh, termasuk penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada <i>shareholder</i> dan pemangku kepentingan lainnya didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Bank mampu menyediakan data & informasi untuk pengambilan keputusan manajemen.
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	1	0.050	Bank BNP menyusun RBB dengan realistis dan telah memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, dan azas perbankan yang sehat dan sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi Bank dengan realisasi RBB sangat sesuai dengan RBB (<i>Low Strategic Risk rating</i>)
	Nilai Komposit	100.00%		1.60	Predikat Komposit “ Baik “.